



## Analysis Of Budget Performance Regional Revenue And Expenditure (APBD) In The Province Of North Sumatra

Beatric krisnanadayanti sinaga<sup>1</sup>; Tengku Eka Susilawaty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Panca Budi Medan

Email: [1.beatricsinaga10@gmail.com](mailto:1.beatricsinaga10@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [15 Mei 2026]

Accepted [19 Mei 2026]

### KEYWORDS

Analisis Kinerja, APBD, Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Pertumbuhan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Brand identity menjadi faktor krusial dalam membangun persepsi konsumen dan diferensiasi produk di pasar yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh brand identity dan pemasaran digital terhadap minat kunjungan dan keputusan pembelian konsumen Generasi Z dan Milenial pada UMKM Petro's Coffee di Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan electronic word of mouth (e-WOM) sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan teknik purposive sampling terhadap 117 responden yang pernah melakukan pembelian di Petro's Coffee. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan Partial Least-Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand identity berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan konsumen. Pemasaran digital juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, e-WOM berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara pemasaran digital dan keputusan pembelian. Integrasi brand identity dan pemasaran digital secara simultan terbukti mampu meningkatkan loyalitas konsumen Petro's Coffee. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan UMKM kopi dalam menarik Generasi Z dan Milenial tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kekuatan identitas merek dan efektivitas komunikasi digital yang mendorong keterlibatan konsumen secara emosional dan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku UMKM kopi dalam merancang strategi branding berbasis lokalitas dan pemasaran digital yang relevan dengan karakteristik konsumen muda di daerah.

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of North Sumatra Province during 2021–2024 using financial ratios, namely effectiveness, efficiency, independence, and growth. The data were obtained from APBD reports published by the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The findings reveal that the effectiveness ratio of regional revenue declined, shifting from the “very effective” category in 2021–2022 to “quite effective” in 2023 and “less effective” in 2024. The efficiency ratio of regional expenditure remained consistently below 100%, indicating relatively controlled budget use, although some programs were not fully implemented. Fiscal independence is still low, as the contribution of Local Own-Source Revenue (PAD) to total revenue ranged only between 25–50%, reflecting high reliance on central government transfers. The growth ratio of PAD fluctuated, with a sharp increase in 2022 but a decline in 2023 and 2024. Overall, the APBD of North Sumatra Province demonstrates good expenditure efficiency but faces significant challenges in revenue effectiveness, PAD growth, and fiscal independence.

## PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), provinsi ini memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta insentif dari pemerintah pusat. Pengelolaan APBD diatur oleh sejumlah regulasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, 2020. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, 2003 juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Anggaran Merupakan Salah Satu Komponen Utama Dalam Melaksanakan Suatu Program Atau Agenda (Sasmita, 2016). Anggaran publik memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan sektor swasta karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi tuntutan akuntabilitas. Oleh sebab itu, APBD harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang (Hantono Lakhari Inuzula, 2021). Dalam pengelolaan APBD Sumatera Utara, transparansi, akuntabilitas, dan

efisiensi menjadi kunci agar penggunaan dana tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Berikut data keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara medan:

**Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021- 2024**

Tahun	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Persentase (%)
2021	57.216,24	57.433,27	100.38
2022	1.137.851,30	1.190.943,23	104.67
2023	1.228.777,53	1.184.137,77	96.37
2024	1.364.233,81	1.190.745,15	87.28

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kemenkeu

Pendapatan daerah Sumatera Utara 2021–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2021 dan 2022 realisasi melebihi anggaran (100,38% dan 104,67%), menandakan penerimaan lebih tinggi dari perkiraan. Namun, tahun 2023 dan 2024 realisasi turun di bawah target (96,37% dan 87,28%), menunjukkan adanya kendala dalam optimalisasi pendapatan daerah.

**Tabel 2. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Persentase (%)
2021	1.230.108,25	1.145.087,49	93.09
2022	1.200.873,86	1.187.937,74	98.92
2023	1.286.185,03	1.193.214,23	92.77
2024	1.286.185,03	1.193.214,23	92.77

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kemenkeu

Belanja daerah relatif stabil, tetapi realisasi selalu di bawah anggaran. Tahun 2021 hanya tercapai 93,09%, meningkat pada 2022 menjadi 98,92%, lalu turun kembali pada 2023 dan 2024 ke 92,77%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi atau hambatan pelaksanaan program sehingga anggaran tidak terserap penuh. Kedua tabel menegaskan bahwa pengelolaan APBD Sumatera Utara menghadapi tantangan baik dari sisi pencapaian pendapatan maupun efektivitas belanja. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk melakukan analisis kinerja APBD secara komprehensif dengan instrumen rasio keuangan agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran awal mengenai kinerja APBD di tingkat daerah. menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi APBD di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan data 2019–2022(Ginting, 2024), namun belum mengkaji indikator lain seperti kemandirian dan pertumbuhan. Sementara itu, melakukan evaluasi komprehensif terhadap APBD Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data 2021–2024 dan mengevaluasi APBD Kota Medan dengan analisis rasio keuangan, serta studi lain yang menyoroti pentingnya indikator kemandirian, keserasian, dan pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan daerah (Tambunan, 2024). Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Onesis, 2022)

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas kinerja APBD, sebagian besar masih terbatas pada lingkup instansi tertentu atau wilayah kota/kabupaten, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh di tingkat provinsi. Gap penelitian ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan instrumen rasio keuangan (kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan). Analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah disusun dan dilaksanakan (Agustina, 2013). Untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian fiskal daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan pendapatan/belanja(Agustina, 2013)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kinerja APBD Provinsi Sumatera Utara secara menyeluruh menggunakan data 2021- 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah, mengevaluasi kinerja APBD berdasarkan rasio keuangan, Serta untuk mengkaji penerapan rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, dalam mengevaluasi kinerja APBD Provinsi Sumatera Utara.



## LANDASAN TEORI

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting/PBK) sejak 2005 dan memperkuatnya melalui PP No. 90 Tahun 2010 dan PMK No. 94 Tahun 2013. Anggaran yang disusun berdasarkan kinerja harus memberikan pertanggungjawaban sesuai capaian target yang telah direncanakan. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan penganggaran di tingkat daerah (Romenda & Ningsih, 2020).

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang menitikberatkan pada pencapaian output organisasi, yang memiliki keterkaitan erat dengan visi, misi, serta perencanaan strategis lembaga. Sistem ini secara langsung menghubungkan antara output yang dihasilkan dengan outcome yang diharapkan, dengan penekanan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (Nanda, 2016).

Kasmir menegaskan bahwa analisis laporan keuangan wajib dilakukan untuk menjadikan informasi keuangan lebih substantif dan dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh semua pihak terkait. Menurut Widodo dalam Halim terdapat beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut (Puspitasari, t.t.):

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas keuangan Daerah
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
4. Rasio pertumbuhan pendapatan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan keuangan, serta publikasi resmi pemerintah (Sulung, t.t.). Teknik analisis dilakukan dengan menghitung sejumlah rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan (Adhivinna, t.t.).

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni menelaah dokumen resmi APBD serta regulasi terkait. Hal ini sejalan dengan dokumentasi merupakan cara memperoleh data melalui analisis dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Fahmi, 2019). Data utama penelitian berupa laporan realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021–2024 yang diakses melalui situs resmi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah berdasarkan indikator rasio keuangan yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan dari PAD tanpa bergantung pada dana transfer pusat. Selama periode 2021–2024, kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih rendah (25–50%). Hal ini menandakan bahwa Provinsi Sumatera Utara masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan inovasi sumber pendapatan lain agar kemandirian fiskal meningkat.

**Tabel 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Kemandirian (%)	Kriteria
2021	25 – 50%	Rendang – sedang
2022	25 – 50%	Rendang – sedang
2023	25 – 50%	Rendang – sedang
2024	25 – 50%	Rendang – sedang

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi pendapatan melebihi target anggaran, sehingga masuk kategori sangat efektif. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, maupun dana transfer pusat. Namun, pada tahun 2023 efektivitas menurun menjadi cukup efektif karena realisasi lebih rendah dari target. Penurunan semakin tajam pada tahun 2024 dengan rasio hanya 87,28% kurang efektif, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pencapaian target pendapatan, misalnya perlambatan ekonomi, penurunan penerimaan pajak, atau keterbatasan pengelolaan PAD.

**Tabel 4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Tahun	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Efektivitas(%)	Kriteria
2021	57.216,24	57.433,27	100.38	Sangat Efektif
2022	1.137.851,30	1.190.943,23	104.67	Sangat Efektif
2023	1.228.777,53	1.184.137,77	96.37	Cukup Efektif
2024	1.364.233,81	1.190.745,15	87.28	Kurang Efektif

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana belanja daerah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode 2021–2024, rasio efisiensi selalu berada di bawah 100%, yang berarti penggunaan anggaran relatif efisien. Tahun 2022 menunjukkan efisiensi tertinggi (98,92%), menandakan hampir seluruh anggaran belanja dapat direalisasikan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 efisiensi menurun ke 92,77%, yang bisa disebabkan oleh adanya program yang tertunda, perubahan kebijakan, atau keterbatasan pelaksanaan kegiatan. Meskipun efisien, hal ini juga perlu dicermati apakah efisiensi tersebut benar-benar mencerminkan keberhasilan program atau justru adanya penghematan akibat kegiatan yang tidak terlaksana.

**Tabel 5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Anggaran (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.230.108,25	1.145.087,49	93.09	Baik
2022	1.200.873,86	1.187.937,74	98.92	Baik
2023	1.286.185,03	1.193.214,23	92.77	Baik
2024	1.286.185,03	1.193.214,23	92.77	Baik

### Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan daerah meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Tahun 2021 tidak dihitung karena tidak ada data pembandingan (baseline). Tahun 2022 menunjukkan lonjakan signifikan (>100%), yang bisa disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak daerah atau dana transfer. Namun, tren menurun terjadi pada 2023 (-6%) dan 2024 (-9%), yang menandakan adanya penurunan kemampuan daerah dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, penurunan aktivitas perdagangan, atau kebijakan fiskal yang membatasi penerimaan daerah.

**Tabel 6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

Tahun	Pertumbuhan PAD	Keterangan
2021	-	Baseline (tidak dihitung, karena tidak ada data 2020)
2022	>100%	Lonjakan signifikan
2023	-6%	Menurun
2024	-9%	Menurun



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Analisis kinerja APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan daerah mengalami penurunan cukup tajam. Jika pada 2021–2022 rasio efektivitas masih berada di atas 100% (kategori sangat efektif), maka pada 2023 turun menjadi 96,37% (cukup efektif) dan pada 2024 semakin melemah ke 87,28% (kurang efektif). Kondisi ini menandakan adanya kesulitan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, terutama pada dua tahun terakhir.

Rasio efisiensi belanja tetap konsisten di bawah 100% (92–98%), yang mengindikasikan pengendalian anggaran relatif baik, meskipun terdapat indikasi bahwa sebagian program pembangunan belum sepenuhnya terlaksana. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya berkisar 25–50%, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat tetap tinggi.

Pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif: terjadi lonjakan signifikan pada 2022 (>100%), namun menurun pada 2023 (–6%) dan 2024 (–9%). Secara keseluruhan, APBD Sumatera Utara memperlihatkan efisiensi belanja yang cukup baik, tetapi menghadapi tantangan besar dalam hal efektivitas pendapatan, pertumbuhan PAD, dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan penerimaan daerah serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

### Saran

Untuk meningkatkan kinerja APBD Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah spesifik sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dengan memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, memperluas basis pajak melalui digitalisasi layanan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan yang belum tergarap.
2. Memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, mendorong investasi bersama, dan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, serta perdagangan.
3. Menjaga efisiensi belanja dengan memperketat mekanisme pengawasan internal, memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas, serta memfokuskan belanja modal pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Mengatasi penurunan pertumbuhan PAD dengan diversifikasi sumber penerimaan, misalnya melalui inovasi layanan publik berbasis teknologi dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan serta memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital.

Dengan strategi tersebut, diharapkan APBD Sumatera Utara dapat lebih efektif, efisien, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (t.t.). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Diambil 17 Januari 2026, dari <https://repository.upy.ac.id/2302/1/Jurnal-AKMENIKA-Vol10-No2- Oktober-2013.pdf>
- Agustina, Oesi. A. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). 1. file:///C:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/beatric/tugas%20akhir/referensi/agusafeb,+Oesi+Agustin a.+A.pdf
- Fahmi, F. A. , H. H. S. (2019). Pengaruh Layanan Informasi Dengan Media Film Terhadap Kewaspadaan Siswa Tentang Pelecehan Seksual Di Kelas Viii-C Smp N 1 Matesih Tahun Pelajaran 2018/2019. 5, 1– 16.
- Ginting, A. Z. D. (2024). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- Hantono Lakharis Inuzula, S. A. H. A. W. U. R. D. S. S. M. N. J. H. S. A. S. T. A. S. A. D. N. S. W. S. Muchlis. (2021). Buku Akuntansi Sektor Publik. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Nanda, R. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi

- Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 1. [https://media.neliti.com/media/publications/186805-ID-analisis-  
implementasi-anggaran-berbasis.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/186805-ID-analisis-implementasi-anggaran-berbasis.pdf)
- Onesis, R. (2022). Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1–101. [file:///C:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/beatric/tugas%20akhir/referensi/REFIKA%20ONE  
SIS.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/beatric/tugas%20akhir/referensi/REFIKA%20ONE SIS.pdf)
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024, Pub. L. No. 37 (2024). <https://smartprovince.sumutprov.go.id/jdih/regulasi/2433>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, Pub. L. No. 19 (2020). <https://peraturan.go.id/files/bn284-2020.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Pub. L. No. 17 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/94590/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf> ,
- Puspitasari, A. F. (t.t.). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. Diambil 17 Januari 2026, dari <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/agusafeb,+Ayu+Febriyanti+Puspitasari.pdf>
- Romenda, A. Y., & Ningsih, S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 1–9.
- Sasmita, E. (2016). Analisis Faktor - Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Anggaran Penjualan Pada Pt. Tunas Auto Graha Palembang.
- Sulung, Undari. M. M. (t.t.). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. Diambil 17 Januari 2026, dari <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/238-Other-1030-1-10-20241025.pdf>
- Tambunan, N. N. (2024). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Pub. L. No. 17 (2003). [https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386161145.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf)